

ABSTRAK

“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”

Perkembangan dalam dunia ketenagakerjaan telah banyak mengalami berbagai permasalahan terutama yang bergerak pada bidang perindustrian, tidak hanya mempekerjakan pekerja non disabilitas saja, tetapi juga memperkerjakan pekerja penyandang disabilitas. Hal tersebut membuktikan bahwa pada saat ini, sudah tidak ada lagi diskriminasi dalam lapangan ketenagakerjaan, namun ternyata diskriminasi malah terjadi didalam perusahaan itu sendiri yang mengabaikan hak-hak terhadap pekerja penyandang disabilitas, seperti tidak adanya aksesibilitas, tidak adanya alat pelindung dan alat bantu kerja sesuai derajat dan tingkat kecacatan pekerja penyandang disabilitas.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang diberikan terhadap pekerja penyandang disabilitas yang diberikan oleh perusahaan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang atau justru perlindungan ini masih jauh dari apa yang telah Undang-Undang amanatkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya yang menyangkut dalam masalah penelitian ini disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Serta pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada bahan atau data-data sekunder yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya.

Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu kadaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi, teori keadilan merupakan tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan Perundang-Undangan, teori perlindungan Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja penyandang disabilitas di dalam perusahaan industri garment ini, belum berjalan maksimal. Dimana dalam pelaksanaannya tidak ada fasilitas dan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja penyandang disabilitas sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan belum memenuhi hak-hak dan belum menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk memenuhi semua itu maka dilakukan upaya seperti, memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, menambah jumlah pengawas, mengikuti program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.